



Rancangan Akhir

RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2026



 PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK PEMULA Dalam rangka Mengoptimalkan Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke-599  DISPENDUKCAPI GO TO SCHOOL Seperti Urus Administrasi Anda Cepat, Mudah, dan Bebas Biaya	 PELAYANAN JEMPUT BOLA SALAH SAK JANGKAH Dalam rangka Mengoptimalkan Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke-599  DISPENDUKCAPI GO TO SCHOOL Seperti Urus Administrasi Anda Cepat, Mudah, dan Bebas Biaya	 PELAYANAN SI JARAN LJO Dalam rangka Mengoptimalkan Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke-599  DISPENDUKCAPI GO TO SCHOOL Seperti Urus Administrasi Anda Cepat, Mudah, dan Bebas Biaya	 PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK PEMULA Dalam rangka Mengoptimalkan Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke-599  DISPENDUKCAPI GO TO SCHOOL Seperti Urus Administrasi Anda Cepat, Mudah, dan Bebas Biaya
--	--	---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renja) Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2025-2029, sehingga telah dilakukan penyelerasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Blitar, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	1
	4
BAB I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	4
Landasan Hukum	5
Maksud dan Tujuan	6
Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan 2025	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	51
3.3. Program dan Kegiatan.	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V. PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Blitar Tahun 2025.....</u>	<u>9</u>
<u>Tabel 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Pencatatan</u>	<u>9</u>
<u>Tabel 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi pencapaian Kinerja</u>	<u>12</u>
<u>Tabel 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target Program/Kegiatan.....</u>	<u>14</u>
<u>Tabel 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target</u>	<u>13</u>
<u>Tabel 2.1.6. Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , memenuhi atau melebihi tarhet kinerja.....</u>	<u>15</u>
<u>Tabel 2.1.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra.....</u>	
<u>Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024</u>	<u>III-3</u>
<u>Tabel 2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....</u>	
<u>Tabel 2.2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....</u>	
<u>Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....</u>	
<u>Tabel 3.1 Keselarasan Tema RKP, RKPD Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Blitar....</u>	
<u>Tabel 3.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....</u>	
<u>Tabel 3.3. Rumusan Rencana Blitar Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....</u>	<u>III-4</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) memiliki peran strategis sebagai panduan tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan perubahannya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2025-2029, sehingga telah dilakukan penyelerasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD. Selanjutnya, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran 2026. Renja disusun untuk menjamin keterpaduan antara rencana strategis Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan ke dalam program dan kegiatan yang operasional dan terukur tahun 2026.
2. Memberikan pedoman penyusunan prioritas dan plafon anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Bab ini menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan inputan Renja pada SIPD Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Dispendukcapil Kabupaten Blitar Tahun 2024 – 2025 memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dispendukcapil Kabupaten Blitar tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan pokok-pokok materi yang disajikan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja Renstra		Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang tidak memenuhi target	
		2024	2025	2024	Smt I Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP OPD)	B 60,00	B 65,00	CC 55,80	Masih tahap penilaian APIP. Hasil penilaian mandiri tahun 2025 nilai SAKIP 76, 85 (Kategori BB)
				Keterangan : Seluruh rekomendasi hasil penilaian yang menjadi nilai Pengurang telah ditindalanjuti pada Semester II tahun 2024	

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sesuai Renstra 2021-2026.

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja Renstra		Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang memenuhi target	
		2024	2025	2024	Smt I Tahun 2025

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	4 dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan

	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator : Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>				
2	<p>Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>Indikator : 1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik 2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak</p>	<p>1. 98,00%</p> <p>2. 30% (PK Dirjen)</p> <p>3. 60% (PK Dirjen)</p>	<p>1. 98,75%</p> <p>2. 30% (PK Dirjen)</p> <p>3. 60% (PK Dirjen)</p>	<p>1. 99,75%</p> <p>2. 5,09%</p> <p>3. 60,37%</p>	<p>1. 98,15%</p> <p>2. 5,67%</p> <p>3. 62,63%</p>
	<p>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Indikator : Persentase laporan koordinasi yang disusun</p>	100%	100%	100%	100%
	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Indikator : Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diproses</p>	100%	100%	100%	100%
3	<p>Program Pencatatan Sipil</p> <p>Indikator : Persentase</p>	100%	100%	100%	100%

	dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan				
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator : Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses	100%	100%	100%	100%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator : Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja Renstra		Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang melebihi target	
		2024	2025	2024	Smt I Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	31 orang	31 orang	24 orang	33 orang

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Tabel Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

No	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang tidak memenuhi target	Faktor penyebab tidak memenuhinya target
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP OPD)</p>	<p>CC</p> <p>55,80</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan Defenisi Operasional pada dokumen IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah tersaji tapi belum sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2022 IKU Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Membuat dan menyajikan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu SOP monev renstra 3. Dokumen Perencanaan Kinerja pada website Perangkat daerah dan esr.menpan.go.id diunggah tepat waktu 4. Penyajian Croscutting telah disusun tapi belum menggambarkan hubungan kinerja dengan tupoksi. 5. Penyusunan SOP tentang Juknis pengukuran kinerja belum lengkap 6. Pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang telah dilakukan tapi kurang berkala 7. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai pengampu aplikasi SIYAKIN dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. 8. Membuat secara rutin notulen monev internal atas hasil pengukuran kinerja secara berkala bulanan/triwulan/semester, dan atas uraian strategi dan kebijakan dalam meningkatkan capaian kinerja. 9. Menyusun Laporan Kinerja Triwulanan dan semester dan disampaikan kepada Bupati 10. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja mengungkap informasi tentang perbandingan realisasi kinerja

			<p>dengan target jangka menengah antara lain IKM dan pencapaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Dokumen laporan kinerja sesuai dengan sistematika 12. Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja. 13. Memanfaatkan Pelaporan Kinerja untuk memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. 14. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan belum terdomonentasi dengan baik 15. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat terkait aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal karena aplikasi SIYAKIN merupakan wewenang Bagian Organisasi
--	--	--	---

	Program/Kegiatan yang melebihi target		
2	Smt I Tahun 2025		
	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	33 orang	Jumlah ASN mengalami peningkatan dikarenakan adanya penerimaan ASN kategori PPPK

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD.

(tabel dipisahkan antara yang tidak memenuhi dan melebihi target)

No	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang memenuhi target	Implikasi yang timbul terhadap capaian Program yang tidak memenuhi target Renstra
	Tahun 2024		
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</p> <p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>CC</p> <p>55,80</p>	<p>Nilai SAKIP tidak memenuhi namun secara akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan</p>

			pada Semester II Tahun 2024
--	--	--	-----------------------------

No	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang memenuhi target	Implikasi yang timbul terhadap capaian Program yang melampaui target Renstra
	Tahun 2025 SMT I		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	Berpengaruh terhadap jumlah gaji dan tunjangan ASN

- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Tabel Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi target kinerja program/kegiatan yang tidak tercapai.

No	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Hasil/Keluaran yang tidak memenuhi target	Kebijakan/tindakan
	Tahun 2024		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	CC 55,80	Rekomendasi tahun 2024 telah dilaksanakan dan sesuai, dan menjadi rujukan dan bahan evaluasi untuk penilaian SAKIP tahun selanjutnya
2	Smt I Tahun 2025		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	33 orang	Penyesuaian anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN pada P-APBD tahun 2025 dan Rencana APBD Tahun 2026

Tabel 2.1.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dispendukcapil Kab. Bitar s/d Tahun 2025.

Kode	Urusan / bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTargetRenstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.12.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RenstradanRenja Perangkat Daerah yang disusun	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%
2.12.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	0	1	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%
2.12.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	3	100%
2.12.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	4	100%	4	4	4	4	4	100%
2.12.01.2.0 2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat Waktu dan akuntabel</i>														
2.12.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	33	31	33	31	31	31	31	93%	33	31	31	31	31	93%
2.12.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	3	100%
2.12.01.05	<i>Administrasi</i>	<i>PersentaseASN yang</i>														

	<i>Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>																	
2.12.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	1	100%	50	31	62%								
2.12.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	80	80	80	80	100%	80	80	100%								
2.12.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	0	300	0	100%	300	300	300	300%								
2.12.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	80	80	80	80	100%	80	80	100%								
2.12.01.2.0 6	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>																	
2.12.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	5	100%	5	5	100%								
2.12.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	2	100%	2	2	100%								

2.12.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	2	100%
2.12.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%
2.12.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100%
2.12.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan	12	0	12	0	0%	12	0	0	0	0	0%
2.12.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	12	0	0%	12	0	0	0	0	0%
2.12.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	10	100%	10	10	10	10	10	100%
2.12.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	12	12	100%	
2.12.01.2.0 7	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang/tepat Sasaran</i>											
2.12.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	2	10	2	20%	10	2	2	2	20%	
2.12.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10	2	10	2	20%	15	2	2	2	13%	

		diadakan																	
2.12.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau angunan Lainnya yangdiadakan	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	2	2	100%					
2.12.01.2.0 7.11	PengadaanSaranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunanlainnyayang diadakan	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%					
2.12.01.2.0 8	PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yangdisediakancepat waktu																	
2.12.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasaSurat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	12	100%					
2.12.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	12	100%					
2.12.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	12	100%					
2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseBarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik																	
2.12.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	12	12	12	12	12	12	12	100%	12	12	12	100%					

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
2.12.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100%
2.12.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
2.12.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan												
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan</i> Pendaftaran Penduduk													
2.12.02.2.0 1.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100%
2.12.02.2.0 1.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100%
2.12.02.2.0 2	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>													

2.12.02.2.0 2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	
2.12.02.2.0 3	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>																				
2.12.02.2.0 3.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non - Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan																			
2.12.03.2.0 1	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>																				
2.12.03.2.0 1.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	100%
2.12.03.2.0 1.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%

2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan																	
2.12.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan																		
2.12.05.2.0 1.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%								

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, pengukuran kinerja pelayanan berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdapat dalam Tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2025
(Data s.d 30 Juni 2025)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			null	null	90,20	90,40	81,52	90,98	91,00	91,10	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Prosentase KTP EI + Prosentase IKD + Prosentase KIA + Prosentase Akta Kelahiran) / 4			null	null	66,19	67,69	62,29	65,75	66,19	67,69	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B 60,00	B 60,10	B 60,50	B 60,60	B 60,02	CC 55,80	B 60,50	B 60,60	

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2023 dan 2024 dilaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat walaupun tidak masuk dalam target Rencana Strategis (Renstra), dan baru masuk dalam target Rencana Strategis pada tahun 2025 melalui Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 81,52 dan tahun 2024 adalah 90,98. Dalam capaian tersebut diproyeksikan di akhir tahun 2025 akan mendapat nilai 91,00 dan pada tahun 2026 diproyeksikan dengan nilai 91,10.

Untuk Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan akumulasi dari persentase KTP EI, persentase IKD, persentase KIA dan Akta Kelahiran dibagi 4. Persentase KTP EI pada tahun 2023 adalah 98,63%, tahun 2024 adalah 99,74% dan tahun 2025 Semester I adalah 98,15%. Untuk cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2023

adalah 2,18%, tahun 2024 adalah 5,09% dan per akhir Semester I adalah 5,09%. Sedangkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 adalah 51,41%, tahun 2024 adalah 60,37%, pada tahun 2025 Semester I adalah 62,63%. Kepemilikan Akta Kelahiran dari target tahun 2023 adalah 92,00% dengan realisasi capaian adalah 96,95%. Target tahun 2024 adalah 93,09% dengan capaian realisasi adalah 97,82%.

Untuk Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program penunjang urusan pemerintahan Daerah (Nilai SAKIP OPD) pada tahun 2023 ditargetkan nilai 60,00 dan terealisasi 60,02, 2024 ditargetkan nilai 60,10 dengan realisasi 55,80 dengan kategori CC. Pada tahun 2025 ditargetkan adalah 60,60 dengan kategori B, dari hasil evaluasi mandiri (self-Assesment) dengan nilai 76,85 dengan kategori BB.

Sedangkan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) mulai tahun 2023 sampai dengan Semester I tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2025
(Data s.d 30 Juni 2025)

No	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Prosentase KTP EI + Prosentase IKD + Prosentase KIA + Prosentase Akta Kelahiran) / 4	null	null	66,19	67,69	62,69	67,75	66,19	67,69	

Dari tabel diatas dapat dilihat semua indikator telah tercapai dan menunjukkan trend yang terus naik.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maupun isu-isu yang bersifat eksternal :

- 1) Target Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI) terus menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun, namun perlu diperhatikan adalah tingkat migrasi yang tinggi dan distribusi domisili kependudukan yang beragam dan letak geografis yang bervariasi. Selain itu pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan perlu peningkatan karena ada ODGJ yang belum memiliki identitas kependudukan berupa KTP Elektroik.
- 2) Persentase cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital belum optimal, hingga

akhir tahun 2024 tercapai 5,27%, sedangkan target capaian pada tahun 2025 adalah 8,00% dan target Nasional tahun 2024 adalah 30%.

- 3) Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2024 adalah 60,37%, sedangkan target Nasional adalah 75%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak semakin meningkat kedepannya.
- 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dari target 60,10 dengan Kategor "B" di tahun 2024 terealisasi 55,80 dengan kategori "CC". Hal ini menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan kedepannya semakin baik.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Sebagian masyarakat belum menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
3. Sarana dan prasarana yang belum diupgrade untuk percepatan layanan;
4. Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
6. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data serta dihapusnya data kependudukan lokal di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Blitar maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
7. Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan :

1. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait,
2. Adanya komitmen Sumber Daya Manusia yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik,
3. Adanya anggaran dan tatakelola sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu,
4. Dukungan stake holder untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan,
5. Terdapat 3 (tiga) lokasi untuk operasional, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kanigoro, TLA Srengat dan TLA Wlingi,
6. Dilakukan inovasi layanan secara terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan

kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan setiap isu pembangunan yang ada dalam pembangunan di Kabupaten Blitar. Sebagai penyedia dan pemadanan data.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan Tahap I (2025-2029) dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan umum Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 turut menjadi acuan penting dalam merumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2026, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan.

Visi pembangunan Kabupaten Blitar periode tahun 2025-2029 adalah, "**Blitar Berdaya dan Berjaya**". Untuk mencapai visi tersebut diperlukan strategi yang terarah dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder). Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, sehingga Kabupaten Blitar dapat mewujudkan keberdayaan dan kejayaannya secara nyata.

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Program-Program Prioritas dalam pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penanganan Angka Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Sekolah Lapang;
2. Beasiswa Blitar Mengabdi;
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
4. Jaminan kesehatan bagi warga lanjut usia;
5. Penanganan Balita Stunting;
6. Penyelenggaraan Festival Lansia;
7. Program peningkatan produktifitas Lansia untuk mencegah kepikunan;
8. Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan;
9. Penyediaan ruang – ruang kreatif bagi pemuda;
10. Bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas;
11. Penyelenggaraan festival karya disabilitas;

12. Ketahanan pangan berbasis keluarga melalui integrated farming;
13. Penumbuhan dan pendampingan wirausaha muda pemula;
14. Pendampingan kemandirian ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga;
15. Penguatan branding dan promosi pariwisata daerah;
16. Penguatan kelompok – kelompok sadar wisata;
17. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas berketerampilan;
18. Grace Period bagi Pengusaha / Investor baru (kebijakan insentif kemudahan investasi);
19. Dukungan standarisasi mutu dan fasilitasi sertifikasi produk;
20. Standarisasi mutu dan akses ekspor produk lokal;
21. Peningkatan daya saing UMKM dan optimalisasi peran koperasi;
22. Penumbuhkembangan wisata desa;
23. Menjamin ketersediaan bibit dan pupuk;
24. Penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk persawahan;
25. Bantuan akses pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
26. Peningkatan sadar lingkungan;
27. Pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
28. Menyediakan fasilitas internet gratis bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan;
29. Mewujudkan Kabupaten Blitar terang benderang;
30. Pemberian tunjangan bagi guru ngaji, sekolah minggu dan pengajar sosial keagamaan lainnya.

Dengan mempertimbangkan Program-Program Prioritas di atas maka ditetapkan Tema RKPD tahun 2026 sebagai berikut : **“Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif,”** dengan 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2026, yaitu :

1. Pemerataan konektivitas infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian;
3. Pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan industri serta pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pengembangan Ekonomi;
4. Pembangunan SDM yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif; dan
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik

Untuk menjabarkan Program Prioritas di atas, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah mendukung prioritas V, yaitu : **“Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kualitas Pelayanan Publik”**. Untuk selanjutnya, dalam melakukan

revisi dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Table 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKKP Tahun 2026 Kabupaten
Bitar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Ribuan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 9.556.760.404,-													
	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Dinas Dukcapil	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	81	6.919.182.154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	81	6.919.182.154			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)		Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	2.424.400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dinduk capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	2.424.400			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	7 dok	2.424.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	7 dok	2.424.400			
	Koordinasi		umlah Dokumen	1	0	Koordinasi dan	Dinduk	umlah Dokumen	1	0			

dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	capil	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	0

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	0	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuratabel	100%	4.058.711.481		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuratabel		4.230.869.970	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	4.056.760.405		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	4.226.638.470	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SPKD	1 dokumen	1.951.076		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinduk capil	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SPKD	1 dokumen	1.951.076	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	0	

SKPD														
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	0	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	0					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	0					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0					

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dindik capil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	63.403.600				
Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	74 paket	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	1 paket	33.403.600				
Pendataan dan Pengolahan		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 dokumen	0				

	Administrasi Kepegawaia		Kepegawaian			Administrasi Kepegawaia		Kepegawaian					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	0			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 orang	0			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	300 orang	0			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta yang mengikuti bintek	10 orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta yang mengikuti bintek	10 orang	0			
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel		769.118.640	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD		769.118.640			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	1 paket	19.983.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	1 paket	19.983.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	237.608.940	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	237.608.940
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	25.176.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	25.176.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	13.465.600	Penyediaan Bahan Logistik	Dinduk capil	Pemenuhan bahan logistic	12 bulan	13.465.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	121.323.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinduk capil	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	121.323.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dok	0
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	11.675.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dinduk capil	Pemenuhan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	11.675.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	339.886.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dindik capil	Pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 lap	339.886.000	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	0	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan SPBE	Dukcapil	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	0	
	Penyediaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dukcapil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	0	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD	100%	152.120.900,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindik capil	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD	100%	152.120.900,	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	20 unit	0	Pengadaan Mebel	Dindik capil	Jumlah mebel yang diadakan	20 unit	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	140.415.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dindik capil	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	140.415.200	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukc apil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	11.705.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukc apil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	11.705.700	

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	1.622.886.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase penyediaan jasa penunjang	1.622.886.904	
	Penyediaan n Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menurut	2 laporan	3.136.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Pemenuhan jasa surat menurut	3.136.000,	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	165.945.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	165.945.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	1.453.805.904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	1.453.805.904	
	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milk daerah yang terpelihara	100 persen	313.919.829	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milk daerah yang terpelihara	313.919.829	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak	14 unit	141.154.830	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinduk capil	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak	141.154.830	

	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan			Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan				
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 unit	0	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 unit	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 unit	36.285.000	Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 unit	36.285.000		
	Lainnya											
	Pemeliharaan /Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	133.980.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	133.980.000		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	2.499.999	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara / dipelihara	1 unit	2.499.999		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Dukupi I	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	100%	28.905.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	100%	28.905.000		
	Pelayanan Pencatatan Sipil				28.905.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil			28.905.000		

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16.000 dokumen	28.905.000	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah akta sipil yang diterbitkan	16.000 dokume n	77.709.000	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 layanan	0	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan		1 layanan		0	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	0	0	Sosialisasi terkaitPencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		0	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil				

	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindik capil	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dindik capil	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	0	0
Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	1. Penyelesaian Perakaman dan Pencetakan KTP Elektronik 2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	99,77%	1.232.371.810				1. Penyelesaian Perakaman dan Pencetakan KTP Elektronik 2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	99,77%	1.232.371.810
			11%					2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	11%	
			62%					3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62%	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	225 dokumen	14.000.000		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata	225 dokumen	14.000.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pendaftaran Pendataan		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200000 Dokumen	0		Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200000 Dokumen	0

Penuduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	5 laporan	1.194.640.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	5 laporan	1.194.640.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	10000 dokumen	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	10000 dokumen	0	

Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP EI, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP EI, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase laporan koordinasi yang disusun	100%	23.731.810	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Persentase laporan koordinasi yang disusun	100%	23.731.810	
Koordinasi antar		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar	4 laporan	23.731.810	Koordinasi antar Lembaga	Dinduk capil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar	4 laporan	54.672.400	

Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Pemberitaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kotadalam Pemberitaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemberitaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemberitaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapil	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	1.372.939.440	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dindik capil	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	1.372.939.440	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				9.620.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				9.620.000	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	1 dok	0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	1 dok	0	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	9.620.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	9.620.000	

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.157.414.800	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil		1.157.414.800	
Fasilitas terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan 1.142.414.800	Fasilitas terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan 1.142.414.800	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen 0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen 0	
Komunikasi, Informasi Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Pemangku Kepentingan Masyarakat	kepada dan	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen 15.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	dukcapi	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen 15.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	20.904.640	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dukcapi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	20.904.640	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	20.904.640	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dukcapi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	20.904.640	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	185.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	dukcapi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	185.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapi I	Persentase data profil kependudukan yang disusun	100%	3.362.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinduk capil	Persentase data profil kependudukan yang disusun	100%	3.362.000	

				3.362.000						
Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan		3.362.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan			
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dok	3.362.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dok	3.362.000	
				9.556.760.404					9.556.760.404	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dimulai pada tahun 2024 dan 2025, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Blitar. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Blitar. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas Tahun 2045 yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan Visi Presiden Periode Tahun 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lrmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam

penyusunan rencana keda dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebilakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sedangkan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang linier dan terkait dengan RPJMN tahun 2025-2029 sehingga tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 adalah, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktifitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**".

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan mengimplementasikan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang ada di dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Tema pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026, "**Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif**", memiliki relevansi yang kuat dalam mengarahkan prioritas pembangunan daerah. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama peningkatan konektivitas, produktivitas wilayah, dan akses terhadap layanan dasar. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan fisik semata, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur sosial dan digital yang menunjang pelayanan publik dan efisiensi ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Blitar haruslah selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kebijakan Nasional. Keselarasan tersebut adalah :

Tabel 3.1

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026
Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pengembangan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktifitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi	Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul dan Inklusif

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dan sasaran dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025, yaitu

Tabel 3.2

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	2.	3	4.	5.
1.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Nilai IKM	1. Meningkatny a Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yaitu : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 9.556.760.404,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Blitar. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.232.371.810,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.232.371.810,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 14.000.000,-
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran Rp. 1.194.640.000,-

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.731.810,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 23.731.810,-.

2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 28.905.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, penganggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan anggaran Rp. 28.905.000,-.

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.372.939.440,-. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

- a.** Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.620.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp. 9.620.000,-
 - b.** Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.157.414.800,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 1.142.414.800,-
 - 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - c.** Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 205.904.640,- . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp. 20.904.640,-
 - 2) Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
Anggaran untuk Program ini adalah Rp.3.362.000,- dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :
- a.** Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan, dijalankan dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya dengan anggaran Rp. 3.362.000,-

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.919.182.154,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah). Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagai berikut.

- a.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.424.400,- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 2.424.400,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.058.711.481,- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.058.711.481,-
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 1.951.076,-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran Rp. 0,-
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sejumlah Rp. 0,-

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 769.118.640,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 19.983.000,-
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 237.608.940,-
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp. 25.176.900,-
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 13.465.600,-
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 121.323.200,-
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 11.675.000,-
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 339.886.000,-

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 152.120.900,- dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sejumlah Rp. 140.415.200,-
- 2) Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya sejumlah Rp.

11.705.700,-

f. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.622.886.904,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.136.000,-
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 165.945.000,-
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 1.453.805.904,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.141.154.830,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 141.154.830,-
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 36.285.000,-.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.133.980.000,-

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bitar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bitar

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01	Program Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap Pelayanan administrasi perkantoran			81%	6.919.182.154			100%	10.185.421.000	
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan				2.242.400				594.457.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disusun	dok		2 dok	2.242.400	APBD		2	2.483.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kali		1	0		kali	1	0	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kali		2	0			2	0	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kali		4	0			4	487.300.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah				4.058.711.481					

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (ouput)	Satuan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	orang		33	4.056.780.405			33	3.997.400.000	
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	persen		100	4.231.500			100	5.000.000	
2.12.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				0	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	paket		74	0			74	33.000.000	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang		80	0			80 org	0	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		80	0			80 org	0	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		345	0			0 org	0	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel				769.118.640				1.176.164.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		1	19.983.000			1	1.176.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		1	237.608.940			1 paket	419.982.000	
2.12.01.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket		1	13.465.600			1 paket	14.395.000	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	9		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		1	13.465.600			1	14.395.000	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		1	121.323.200			1	2.750.000	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan		12	11.675.000			12	11.163.000	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		50	339.886.000			50	525.000000	
2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		20	140.415.200			20	210.506.000	
2.12.01.2.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		1	11.705.700			1	66.000.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>	persen		100%	1.622.886.700			100%	2.078.960.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		2	3.136.000			2 bulan	6.960.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		3	165.945.000			3 bulan	204.000.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan		12	1.453.805.904			12 bulan	1.758.000.000	

2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persen		100%	355.712.800			100%	976.225.198
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		14	141.154.830			14 unit	253.000.000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit		50	36.285.000			50 unit	37.116.300
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	unit		1	133.980.000			1 unit	384.000.000
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		1	2.232.371.810			1 unit	2.750.000

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	1. Penyelesaian Peretakan dan Pencetakan KTP Elektronik 2. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (KD) 3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak				1.232.371.810				2.213.480.000		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk				1.553.724.000				2.216.223.600		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	dok		125	14.000.000			125 dok	81.400.000		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	lap		5	1.194.640.000			5	2.054.000.000		

2.12.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>					0													215.000.000
2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	dok			15	0											15 kali	215.000.000

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen		100	1.372.939.440			100	3.818.000.000		
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan				9.620.000				36.000.000		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dok		2	0			2	00		
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dok		5	9.620.000			5 dok	36.000.000		
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan laporan Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.157.414.800				3.155.000.000		
2.12.04.2.03.03	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap		5	1.142.414.800			5 lap	3.100.000.000		

2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	dok		0	0			0 dok	1.400.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kegiatan		1	20.904.640			1	77.000.000
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lap		1	20.904.640			1 lap	77.000.000

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	laporan		1	185.000.000			1	550.000.000,	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				3.362.000				47.964.400	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				3.362.000				47.964.400	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	dok		1	3.362.000			1 dok	55.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempelajari Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 serta;
2. Mendukung pencapaian visi, misi dan tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Blitar 2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki peran dalam pencapaian Visi Bupati Blitar Tahun 2025-2029, yaitu : **"Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya"**. Dan Tema Pembangunan Tahun 2026, yaitu : **"Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul dan Inklusif"**.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Blitar antara Visi Bupati Blitar Tahun 2025-2029 dan Tema Pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Blitar;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.556.760.409,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

6. Program Pendaftaran Penduduk

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.232.371.810,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.232.371.810,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 14.000.000,-
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran Rp. 1.194.640.000,-

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.731.810,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 23.731.810,-.

7. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 28.905.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, penganggaran adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan anggaran Rp. 28.905.000,-.

8. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.372.939.440,-. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

- a.** Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.620.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp. 9.620.000,-
 - b.** Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.157.414.800,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 1.142.414.800,-
 - 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - c.** Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 205.904.640,- . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp. 20.904.640,-
 - 2) Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
Anggaran untuk Program ini adalah Rp.3.362.000,- dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :
- a.** Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan, dijalankan dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya dengan anggaran Rp. 3.362.000,-

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.919.182.154,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah). Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagai berikut.

- a.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.424.400,- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 2.424.400,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.058.711.481,- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.058.711.481,-
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 1.951.076,-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran Rp. 0,-
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sejumlah Rp. 0,-

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 769.118.640,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 19.983.000,-
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 237.608.940,-
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp. 25.176.900,-
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 13.465.600,-
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 121.323.200,-
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 11.675.000,-
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 339.886.000,-

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 152.120.900,- dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sejumlah Rp. 140.415.200,-
- 2) Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya sejumlah Rp.

11.705.700,-

f. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.622.886.904,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.136.000,-
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 165.945.000,-
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 1.453.805.904,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.141.154.830,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 141.154.830,-
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 36.285.000,-.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.133.980.000,-

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Renja Tahun 2026 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang didapat dari :
 - Evaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025;
 - Permasalahn yang ada dan sumber daya yang ada, baik manusia maupun sarana;
 - Tema pembangunan tahun 2026 yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ini juga berpedoman pada RKPDP Kabupaten Blitar Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
5. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2026;
6. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh BAPPEDA LITBANG, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Blitar;

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan

berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh SDM dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan Kabupaten Blitar.

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan acuan dalam kinerja, dalam pelaksanaan diperlukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terutama dari internal Perangkat Daerah dan eksternal, oleh karena itu evaluasi secara rutin dan terus menerus harus dilakukan akan dalam pelaksanaan Renja dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari kinerja tahun 2026.

Blitar, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 199703 1 005